

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan utama adanya perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan keuangan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksaan Keuangan akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah jika Laporan Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat. Atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan dengan relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan (Defitri, 2016).

Badan Pengelolaan Keuangan menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan Daerah seperti : Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, Terlambat penyampaian laporan, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum

didukung SDM yang memadai. Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Susilawati & Dwi Seftihani, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk dari laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010,

Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dengan banyaknya kasus kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran yang berasaldarifakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Setiap unit kerja menentukan target dan tujuan serta merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang memberikan informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara

menyediakan layanan, obyek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan (Jones and Pendlebury, 2000). Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002 dalam Mardiasmo, 2006).

Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008). Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.. Sistem Pengendalian Internal sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan terhadap sistem akuntansi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengambil keputusan serta mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen dan mendukung operasional harian perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal di provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Jawa Barat, dilakukan beberapa metode perhitungan yaitu metode perhitungan analisis data atas tanggapan responden, uji validitas dan reliabilitas, Metode of successive interval, regresi linear sederhana dan korelasi determinasi.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Implementasi sistem pengendalian intern menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pimpinan daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi, mengingat pemimpin daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran kepemimpinan daerah pada dasarnya ada di semua tingkatan organisasi yang bersifat sistemik dan institusional. Sistemik artinya terkait dengan banyak orang yang bekerja berdasarkan suatu sistem dan pada suatu tingkatan tertentu dalam hierarki organisasional.

Sedangkan institusional artinya melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan tersebut dan masing-masing memiliki posisi dalam institusi tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah. Sehingga pemimpin daerah haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kerja sama di antara sistem yang ada dalam pemerintahan daerah.

Fenomena yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2020. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono

saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jabar Tahun 2020 pada akhir Mei menyebutkan, ada sedikitnya empat permasalahan signifikan yang mesti segera ditindaklanjuti.

Pertama, mengenai pemberian tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan kedua, adanya kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiga, pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan, antara lain belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibahnya. Sedangkan yang terakhir mengenai kekurangan volume pekerjaan paket infrastruktur pada 4 OPD. Wakil Ketua BPK juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegasnya. (Permasalahan Signifikan di LK Pemprov Jabar Ini Harus Segera Ditindaklanjuti’ WARTA DIGITAL (bpk.go.id)

Penelitian ini adalah replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diana Sari dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya

Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten)”. Populasi yang digunakan peneliti adalah Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan menggunakan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi sampel.

Variabel penelitian yang diteliti yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyelesaian temuan audit, kualitas laporan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan Banten. Unit observasi menggunakan data primer dengan menyusun daftar pertanyaan (kuisisioner).

Hasil dari penelitian tersebut yaitu sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit, berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit, dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Alasan peneliti memilih Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat sebagai tempat penelitian adalah peneliti ingin mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat telah memenuhi indikator dari standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut merupakan alasan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang terkait sejauh mana realisasi standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Wilayah Jawa Barat. Hal ini yang menelatar belakang peneliti untuk meneliti tentang pemerintahan yang berjudul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Periode Anggaran 2020-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

Kota di Wilayah Jawa Barat

5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
6. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
4. Untuk mengetahui seberapa besar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat
5. Untuk mengetahui seberapa besar Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis dan aspek praktis

1. Manfaat Teoretis

Adapun Manfaat Teoretis dalam Penelitian ini yaitu:

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun Manfaat Praktis dari Penelitian ini yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada

Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Pasundan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat perusahaan dalam melaksanakan tugas/pekerjaanya untuk tetap mematuhi aturan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan senantiasa untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tepat dan akurat.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bahasan yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan Penelitian pada bulan februaridengan pendekatan studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moh. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder.

Tabel 1. 1
Waktu Penelitian

